JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 456-462
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v20i2.958

Pengaruh Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan: Studi Kasus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Bagus Adhitya[1*], Lilis Siti Bariah[2], Suprapto[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR Boenyamin No. 708 Purwokerto
*Coressponding email: bagus.adhitya26@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pariwisata, kredit modal kerja, infrastruktur ekonomi dan kredit konsumsi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel dari 2007 - 2018 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel dependen adalah ketimpangan pendapatan dan variabel independen adalah pariwisata, kredit modal kerja, infrastruktur ekonomi dan kredit konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit pariwisata, modal kerja dan infrastruktur ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan; Sektor Pariwisata; Kredit Modal Kerja; dan Infrastruktur Ekonomi

Abstract. *This study aims to analyze the effect of tourism, working capital credit, economic infrastructure and consumption credit on income inequality in Yogyakarta Special Province. This study uses panel data from 2007 - 2018 in the Special Province of Yogyakarta. The dependent variable is income inequality and the independent variable is tourism, working capital credit, economic infrastructure and consumption credit. The results showed that tourism, working capital credit and economic infrastructure had a negative and significant effect on income inequality, while consumption credit had a positive and significant effect on income inequality in the Special Province of Yogyakarta.*

Keywords: *Income Inequality; Tourism Sector; Working Capital Credit; and Economic Infrastructure*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensial yang melibatkan perubahan – perubahan besar dalam struktur sosial, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan yang absolut (Todaro dan Smith, 2011: 70). Menurut Sari (2017) pembangunan ekonomi selalu menimbulkan polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunan, yaitu pilihan antara memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau distribusi pendapatan. Masalah ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu persoalan yang harus diatasi dalam proses pembangunan. Terjadinya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah indikator makroekonomi. Selain itu perkembangan sistem keuangan dinyatakan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Damanik, *et al* (2018) mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan disetiap daerah terjadi karena adanya perbedaan jumlah penduduk, sumberdaya alam dan ciri khas setiap daerah. Kesenjangan antar masyarakat terjadi akibat dari pembangunan yang tidak merata. Berbagai kebijakan yang dikembangkan untuk unuk menemukan jalan keluar guna mengatasi ketimpangan pendapatan baik ketimpangan pendapatan antar individu atau ketimpangan wilayah belum memberikan output yang memuaskan, sehingga program yang dicanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (2019) melaporkan bahwa pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. Tabel 1 menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY memiliki trend yang positif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainya di Pulau Jawa dengan rata-rata sebesar 5,33% per tahun selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY dimana Provinsi DIY pada tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki indeks gini tertinggi di Indonesia, dengan nilai rata-rata sebesar 0,432. Hal tersebut menunjukan bahwa hasil pembangunan ekonomi yang dicapai Provinsi DIY belum dinikmati secara merata oleh penduduknya.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa 2014-2018.

No	Provinsi	Tahun					Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	DIY	5,17	4,95	5,07	5,26	6,20	5,33
2	DKI Jakarta	4,81	4,84	4,85	5,23	6,17	5,18
3	Jawa Timur	5,18	4,80	4,96	4,86	5,50	5,06
4	Indonesia	5,02	4,79	5,02	5,07	5,17	5,01
5	Jawa Tengah	4,46	4,68	4,52	4,53	5,32	4,72
6	Jawa Barat	3,52	3,52	4,16	3,84	5,64	4,13
7	Banten	3,24	3,24	3,14	3,63	5,81	3,81

Sumber : BPS 2019

Tabel 2. Lima Provinsi dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tertinggi Indonesia Tahun 2014 -2018.

No	Provinsi	Tahun					Rata-rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	DIY	0.427	0.427	0.423	0.436	0.432	0.432
2	Gorontalo	0.433	0.411	0.415	0.418	0.410	0.417
3	Sultra	0.437	0.414	0.413	0.418	0.393	0,415
4	DKI Jakarta	0.434	0.426	0.404	0.411	0.392	0,413
5	Papua	0.434	0.407	0.395	0.398	0.391	0,405

Sumber : BPS 2019
DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta
Sultra : Sulawesi Utara
DKI : Daerah Khusus Ibukota

Samimi & Sadeghi (2011) menjelaskan bahwa sektor pariwisata dapat meratakan pembangunan dari pusat ekonomi ke daerah tertinggal, sehingga pembangunan sektor pariwisata cenderung dijadikan sarana untuk mengatasi ketimpangan pendapatan, seperti yang dijelaskan oleh Raza & Shah (2017) bahwa sektor jasa pariwisata adalah sektor penting yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Beberapa negara telah menjadikan pariwisata sebagai sumber utama pembangunan ekonomi dan saling terkait dengan pertumbuhan ekonomi sedemikian rupa sehingga setiap perubahan di dalamnya dapat mempersempit ketimpangan pendapatan di negara tersebut (Lau *et al*., 2017; Raza *et al.,* 2017). Sektor pariwisata mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat dengan munculnya kegiatan usaha baru dalam masyarkat yang berdampak terhadap meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Haddad *et al,* 2013). Meningkatnya kesempatan kerja akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga dapat mempersempit jarak ketimpangan pendapatan dalam masyarkat (Kamal *et al*, 2015 dan Andras & Goncalves, 2015). Oleh karena itu, keterkaitan sektor pariwisata dengan dengan ketimpangan pendapatan perlu dianalisis lebih lenajut. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan memasukan variabel-variabel kontrol lainya. Variabel kontrol yang dapat digunakan kredit konsumsi, kredit modal usaha, infrastruktur yang diproksi dari panjang jalan, dan inflasi.

Menurut Bank Indonesia (2019) ketimpangan pendapatan merupakan salah satu indikator untuk menentukan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi bergantung terhadap perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dianggap dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat (Greenwood & Javanovic, 2010). Kredit yang diberikan sebagai sumber modal usaha dan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mampu memberikan ketersediaan lapangan kerja lebih banyak dan berdampak terhadap pendapatan masyarkat (Priyono *et al* 2019). Dari sisi lain, kredit akan memberikan dampak pada usaha, kenaikan pembelian input atau penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan ouput, sehingga penjualan dan pendapatan maningkat. Dengan demikian, tambahan modal yang bersumber dari kredit dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, kredit memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat (Balaka, 2007). Madajewicz (2003), mengemukakan bahwa kredit memberikan pengaruh yang cukup luas terhadap pemerataan pendapatan, selian itu kredit memberikan kontribusi positif pada ekonomi masyarakat pedesaan.

Studi empiris Beck & Levine (2007) menunjukkan bahwa kredit modal usaha memiliki hubungan yang negatif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin besar penyaluran kredit akan memacu kegiatan perekonomian disuatu wilayah dan pada akhirnya dapat memeratakan pendapatan. Iacoviello (2013) mengatakan bahwa kredit konsumsi rumah tangga berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, dengan meningkatnya kredit konsumsi yang hanya diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi, membuat ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Greenwood & Javanovic

(2010) menemukan bahwa kredit konsumsi hanya memberikan manfaat bagi kaum kaya dikarenakan hanya diberikan terhadap masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kredit konsumsi tidak digunakan untuk kegiatan produktif, sehingga tidak menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat (Bezemer, 2014).

Selain itu, infrastruktur merupakan peranan penting dalam suatu perekonomian daerah (Sumadiasa, 2016). Beberapa temuan terdahulu mnyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor keberhasilan perekonomian suatu daerah yang berdampak terhadap menurunya tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. (Calderón & Servén, 2004 dan Bajar & Rajeev 2015). Studi empiris Soenandar (2005)) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur disuatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Maryaningsih, *et al* (2014) yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan produktifitas faktor-faktor produksi sehingga mampu menciptakan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. Dengan demikian meningkatnya pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap menurunya ketimpangan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa Provinsi DIY merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi ketimpangan pendapatan antar masyrakat. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DIY yang di jelaskan pada Tabel 2. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik dengan masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan demikia, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh sektor pariwisata dengan ditambah variabel seperti kontrol kredit modal usaha, kredit konsumsi, infrastruktur, komunikasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipan, merupakan teknik pengumpulan data secara observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung namun sebagai pengamat independen (Gujarati, 2010). Lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jakarta. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan dan variabel independenya adalah pariwisata, kredit konsumsi, kredit modal usaha, infrastruktur, dan inflasi. Berikut definisi dari penelitian ini:

a. Ketimpangan pendapatan adalah fenomena terjadinya perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah (Todaro, 2011: 211), yang diukur dengan satuan indek gini.
b. Pariwisata adalah pendapatan dari sektor pariwisata yang didapatkan dari akomodasi dan makan minum (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018), yang diukur dnegan satuan rupiah.
c. Kredit Modal Usaha adalah kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat dengan tujuan untuk keperluan usaha (Fahmi 2011) diukur dengan satuan rupiah.
d. Infrastruktur ekonomi adalah wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003: 124), yang diukur dengan satuan kilometer.
e. Kredit Konsumsi adalah kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat untuk keperluan konsumsi (Fahmi, 2011) yang diukur dengan satuan rupiah.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data *time series* dan data *cross section*. Analisis regresi data panel adalah alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (cross section) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*). Menurut Gujarati (2010). Berikut ini persamaan yang digunakan dalam penelitian ini.

$$KP = \beta_0 + \beta_1 PRW_{it} + \beta_2 MU_{it} + \beta_3 IE_{it} + \beta_4 KK_{it} + e$$

Dimana KP adalah ketimpangan pendapatan, $\beta_{0,1,2,3,4}$ adalah koefisien regresi, PRW adalah pariwisata (satuan rupiah), MK adalah modal usaha (satuan rupiah), IE adalah infrastruktur ekonomi (diproksi dengan panjang jalan dengan satuan kilimeter), KK adalah kredit konsumsi (satuan rupiah), *e* adalah s*tandard error*, *i* adalah *time series*, *t* adalah *cross section.*

Dalam analisis data panel diperlukan penggunaan model yang tepat dalam regresi. Dalam regresi data panel terdapat tiga modal yaitu *common effect*, *fixed effect dan random effect*. Dengan demikian untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji *Lagrange Multiplier*, Uji Chow dan Uji Hausman (Mahulete, 2016). Selain itu, Menurut Algifari (2000:83) model regresi yang menghasilkan estimator linear yang tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BLUE), maka perlu dilakukan

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas,uji multikolinearitas, uji heterokedasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji kesesuain model, tahap pertama yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji chow digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan model *fixed effect.* Output dari uji chow menunjukkan bahwa nilai *Chi Square* sebesar 0,0700 lebih besar dari alpha 0,05. Dengan demikian, model yang digunakan adalah *common effect* jika dibandingkan dengan *fixed effect*. Tahap kedua, yaitu uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model *common effect* atau *random effect*. Namun demikian menurut Gujarati (2010) menjelaskan bahwa uji LM tidak dapat dilakukan apabila jumlah cross-section yang lebih sedikit daripada variabel independen, dengan demikian *model common effet* adalah model yang paling tepat untuk digunakan. Berikut ini tabel yang menunjukkan output regresi data panel dengan *model common effect.*

Tabel 3. Hasil Estimasi Model *Common Effect*

Variabel	Koefisien	T-Statistik	Prob.
Konstanta	0,2368370000	5,964830	0,0000
PRW	0,0000000288	2,351024	0,0223
KMU	-0,0000000959	-2,513148	0,0149
IE	0,0000440000	1,202953	0,2341
KK	0,0000001060	2,736497	0,0083
R squared			0,386196
Adjusted R Square			0,341556

Sumber : Output Eviews

Pariwisata memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000288 dengan nilai probabilitas 0,0223. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada level signifikansi 5 persen. Artinya perkembangan pariwisata yang cukup pesat berdampak terhadap mningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY . Hal tersebut berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya dimana seperti yang dikemukakan oleh Kamal *et al*, (2015) dan Andras & Goncalves, (2015) bahwa perkembangan pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* dengan meningkatkan industri-industri lain untuk meningkatkan devisa dan juga seperti yang dikemukakan oleh Samimi & Sadeghi (2011) yang mengatakan bahwa perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat perekonomian daerah. Sehingga dengan berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan menyerap lapangan pekerjaan baru, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Provinsi DIY merupakan salah satu daerah dengan peekonomian yang ditopang oleh sektor jasa dan pariwisata. Pembangunan fasilitas penunjang seperti hotel begitu pesat di Provinsi DIY. Hal trsebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pembangunan hotel setiap tahunya. Akan tetapi temuan pada penelitian ini menunjukan bahwa pengembangan sektor pariwisata yang begitu pesat belum berkontribusi terhadap pemerataan distribusi pendapatan di Provinsi DIY. Pembangunan hotel, transportasi dan restoran yang menunjang pengembangan sektor pariwisata di Provinsi DIY hanya di nikmati oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi, sehingga tidak berdampak terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah.

Menurut temuan BPS (2018), terdapat dua kelompok masyrakat di Provinsi DIY yang memiliki jumlah pendapatan berbeda. Kelompok pertama adalah mereka yang tingkat pendapatannya rendah karena memiliki initial endowment atau sumber daya bawaan seperti tingkat pendidikan dan status gizi yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan status gizi berdampak terhadap rendahnya produktivitas sehingga tidak memberikan peningkatan jumlah pendapatan yang diterima dalam kelompok masyarakat tersebut. Kemudian kelompok selanjutnya adalah mereka dengan tingkat pendapatan tinggi karena initial endowment serta produktivitas yang juga lebih tinggi sehingga mampu menciptakan jumlah pendapatan yang lebih baik. Hal tersebut yang menjadikan tingkat ketimpangan pendapatan terus meningkat karena adanya perbedaan initial endowment serta produktivitas antar kedua kelompok masyarakat tersebut yang belum mampu secara bersama-sama memanfaatkan pembangunan sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi.

Selanjutnya dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel kredit modal usaha memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,0000000959 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0149. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kredit modal usaha berpengaruh negtif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada level signifikansi 5 persen. Menurut Beck & Levine (2007) kredit modal usaha merupakan kredit produktif yang digunakan dalam dunia usaha yang membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi. Kredit modal usaha yang

diberikan pemerintah kepada masyarakat mampu meningkatkan pertumbuhan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Balaka (2007) menemukan bahwa modal baru yang diterima oleh para pelaku usaha melalui kredit modal usaha dapat menumbuhkan usahanya sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berdampak terhadap meningkatnya pendapatan dalam masyarakat. Dengan demikian, meningkatnya modal usaha yang disalurkan terhadap masyarkat berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan sehingga menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan.

Menurut Tambunan (2012) kredit modal usaha yang juga diberikan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk mengembangkan usaha kecilnya dan memberikan dampak terhadap meningkatnya meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemberian kredit modal usaha dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap menurunya tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Variabel panjang jalan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0000440000 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2341. Artinya bahwa variabel infrastruktur ekonomi yang diproksi dengan panjang jalan di Provinsi DIY tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pembangunan infrastruktur memang tidak akan menghasilkan efek langsung terhadap perekonomian masyarakat, dengan kata lain pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur di suatu daerah tidak serta merta membuat masyarakat di sekitar pembangunan ikut bekerja membangun infrastruktur dan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan jumlah pendapatan. Akan tetapi pembangunan infrastruktur memerlukan waktu yang cukup panjang untuk dapat menciptkana multiplier effect dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Seperti yang ditemukan oleh Soenandar (2005) yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berupa pembangunan jalan akan mampu menggerakan sektor riil, memicu kegiatan produksi, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah. Infrastruktur ekonomi juga merupakan input penting bagi kegiatan produksi dan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur tidak hanya merupakan kegiatan produksi yang akan menciptakan output dan kesempatan kerja, namun keberadaan infrastruktur juga memengaruhi efisiensi dan kelancaran kegiatan ekonomi di sektor-sektor lainnya. Keberadaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Akan tetapi hal tersebut baru dapat dirasakan melalui tahapan proses yang lama, sehingga pembangunan infrastruktur di Provinsi DIY untuk saat ini belum dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat.

Selain itu pembangunan infrastruktur yang belum dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat disebabkan karena belum cukup terkoordinasinya pembangunan panjang jalan dengan pusat-pusat produksi sehingga belum mampu dinikmati oleh sebagian besar masyarakat yang masih berada di garis kemiskinan, sehingga multiplier effect belum belum dirasakan maksimal oleh masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Pembangunan jalan yang dilakukan di pusat-pusat produksi nantinya akan menciptakan usaha usaha baru dan menciptkan lebih banyak lapangan pekerjaan, sehingga pembangunan jalan baru akan dinkmati manfaatnya oleh masyrakat dengan melalui proses yang panjang.

Variabel kredit konsumsi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0000001060 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0083. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 1 persen ketimpangan pendapatan. Menurut Iacoviello (2013) kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan kegiatan konsumsinya. Kredit ini hanya digunakan untuk kegiatan konsumsi sehingga tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kredit konsumsi hanya diberikan kepada golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak dapat memberikan manfaat kepada semua golongan masyarakat. Dengan demikian, tidak meratanya penyaluran kredit konsumsi dan tidak produktifnya dalam pemanfaatan, memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Studi empiris yang dilakukan oleh Iacoviello (2013) menemukan bahwa penyaluran kredit konsumsi yang tinggi, berpengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Kredit yang hanya diberikan kepada masyarakat menengah atas menjadikan jarak ketimpangan pendapatan dalam masyarakat semakin lebar.

Kredit konsumsi merupakan variabel yang berpengaruh paling signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provnsi DIY. Temuan di Provinsi DIY bahwa fenomena modernisasi yang terjadi khususnya di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di Provinsi DIY mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat konsumsi masyarkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat mendorong penyaluran kredit konsumsi dari perbankan kepada masyarakat semakin meningkat. Kredit konsumsi yang ternyata tidak hanya digunakan untuk keperluan konsumsi namun digunakan untuk keperluan produktif, mampu meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Akan tetapi

produktifitas masyarakat yang menggunakan fasilitas kredit konsumsi tersebut tidak bisa menjadi multiplier effect sehingga tidak berdampak terhadap masyarakat lain yang tidak mendapatkan fasilitas kredit tersebut. Dengan demikian, ketentuan kredit konsumsi yang hanya diberikan terhadap masyarakat menengah keatasdan tidak diberikan kepada masyarakat yang berpenghasuilan rendah menjadikan tingkat ketimpanggan pendapatan masyarakat ssemakin tinggi.

SIMPULAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menepati posisi pertama dengan angka persentase tertinggi di Pulau Jawa dan bahkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY dimana Provinsi DIY pada tahun 2014 sampai dengan 2018 memiliki indeks gini tertinggi di Indonesia. Temuan dari penelititan ini adalah bahwa variabel pariwisata dan kredit modal usaha infrastruktur ekonomi berepangaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa perlunya pengembangan sektor pariwisata dan kinerja lembaga keuangan dalam penyaluran kredit, dan perlunya dukungan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2007-2019). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2007-2018. Yogyakarta

Balaka, Yani. (2007). Analisis Pengaruh Kredit Mikro Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Usaha Mikro di Sulawesi Tenggara. (*Disertasi*). Makasar. Universitas Hasanudin Makasar.

Calderón, C., & Servén, L. (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. *Working Papers No. 3400*. doi:10.1596/1813-9450-3400.

Damanik, Zulgani, dan Rosmeli. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. 7(1): 15-25.

Fahmi, I. (2011). "*Analisis Laporan Keuangan*". Bandung: Alfabeta.

Gujarati, Damodar N. Dawn C. Porter. (2010). *Basic Econometrica*. Fifth Edition. New York : Mc Graw Hill.

Greenwood, J. & Jovanovic, B. (2010). Financial Development, Growth, and the Distribution of Income. *The Journal of Political Economy*, 98(5), 1076–1107. doi: 10.3386/w3189

Haddad, A. Porse & Rabahy. (2013). Domestic tourism and regional inequality in Brazil. *Tourism Economics.* 19 (1): 173–186. doi : /10.5367/te.2013.0185

Lacoviello, (2013). Household Debt and Income Inequality, 1963–2003. *Journal of Money, Credit and Banking*, 40(5): 929-965. doi : 10.1111/j.1538-4616.2008.00142.x

Kamal, M. & Shah Alam Kabir Pramanik. 2015. Identifying Factors Influencing Visitor to Visit Museum in Bangladesh and Setting Marketing Strategies for Museum. *Journal of Business and Management* 17(10): 955-988. doi : 10.9790/487X-171028592

Lau, P. L., Koo, T. T., & Dwyer, L. (2017). Metrics to measure the geographic characteristics of tourism markets: An integrated approach based on Gini index decomposition. *Tourism Management*, 59, 171–181. doi: /10.1016/j.tourman.2016.07.019.

Li, Hengyun., Chen, Jason. Li., Li, Gang., Goh, Carey. (2016). Tourism and regional income inequality: Evidence from China. *Annals of Tourism Research*. 58: 81–99. doi : 10.1016/j.annals.2016.02.001

Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Madajewicz, 2003, *Does the Credit Contract Matter?The Impact of Lending Programs on Poverty In Bangladesh*, Colombia University.

Narob, N. (2015). Income Inequality and Inflation in Developing Countries: An Empirical Investigation. *Economics Bulletin*, 35(4), 2888–2902.

Priyono, Pitriyan, Heriyaldi & Maipita (2019) Credit Expansion and Its Impact on Income Inequality of the Provinces in Indonesia *Jurnal Economia*, 15(1), 82-95. Doi : 10.21831/economia.v15i1.23710

Raza, S. A., & Shah, N. (2017). Tourism Growth and Income Inequality: Does Kuznets Curve Hypothesis Exist in Top Tourist Arrival Countries. Asia Pacific. *Journal of Tourism Research*, 22(8), 874–884. doi: /10.1080/10941665.2017.1343742.

Raza, S. A., Sharif, A., Wong, W. K., & Karim, M. Z. A. (2017). Tourism development and environmental degradation in the United States: Evidence from wavelet-based analysis. *Current Issues in Tourism*, 20(16), 1768–1790. doi: /10.1080/13683500.2016.1192587.

Samimi, A. J., Sadeghi, S., & Sadeghi, S. (2011). Tourism and Economic Growth in Developing Countries : P-VAR Approach. *Middle-East Journal of Scientific Research*, *10*(1), 28–32.

Sari, A. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN Member Countries Pada Tahun 2011-2016 . *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(1): 24-29. doi: /10.32812/jibeka.v11i1.26

Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta:Kencana.

Sumadiasa, Tisnawati & Wirathi. (2016). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik dan PMA Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2014.*Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5(7): 925-947*.

Soenandar, Ersi S. (2005). Government Policy In Solving Uneven Regional Development Between West and East Indonesia: Case Study on KAPET. *Economic Journal*, 34. 171-192.

Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. Eleventh Edition. United States: Addison Wesley.